

KEJASAMA INDONESIA-RUSIA DALAM BIDANG MILITER DALAM KONTEKS PENINGKATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Ristra Selly Suoth¹
Michael Mamentu²
Trilke Tulung³

Abstrak

Maraknya konflik dan kejahatan yang mengancam kedaulatan NKRI semakin memperkeruh pertahanan dan keamanan Indonesia. Melemahnya kekuatan TNI pasca embargo militer oleh Amerika Serikat, Perancis, dan Jerman membuat Indonesia merasa perlu untuk melakukan kerjasama militer dengan Negara lain dalam rangka meningkatkan Alutsista dan kualitas TNI sebagai alat pertahanan Negara. Rusia yang semakin maju dalam bidang teknologi dan militer selalu mencari perhatian dan dukungan Negara-negara berkembang dalam mewujudkan kembali 'super powernya'. Hal ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menjalin kembali hubungan 'mesra' dengan Rusia yang sempat renggang selama orde baru berkuasa di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan kedua Negara dalam melakukan kerjasama militer, memahami dan mengeksplorasi berbagai macam konflik yang bisa menjadi ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI. Selanjutnya juga ingin mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan bagaimana pengaruhnya terhadap berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertahanan dan keamanan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: untuk meningkatkan Alutsista dan kualitas TNI dalam rangka menjaga dan meningkatkan pertahanan dan keamanan di Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama militer dengan Rusia yang di implementasikan kedalam dua buah bentuk kerjasama; Kerjasama Pertahanan dan Kerjasama Teknik Militer. Komisi Pemerintahan Indonesia-Rusia di bidang kerja sama Teknik Militer telah menghasilkan nota kesepahaman (MoU) tentang komitmen pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI dari Rusia dan dalam kunjungan ke Moskow pada bulan Desember 2006.

Kata Kunci : **Kerjasama Militer Indonesia-Rusia, Alutsista, TNI, Pertahanan dan Keamanan Indonesia.**

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dan memiliki luas teritorial yang sangat luas yang memiliki panjang garis pantai lebih dari 81.000 km serta 17.508 pulau dan luas laut sekitar 3,1 juta km². Banyaknya permasalahan yang timbul di Indonesia menuntut Indonesia harus mengambil langkah cepat dan tanggap dalam mengatasi permasalahannya. Sebagai contoh dalam permasalahan keamanan nasional, dalam hal tersebut terdapat kendala-kendala strategis yang dialami Indonesia untuk menanggulangi ancaman dari luar maupun dari dalam negeri seperti minimnya alat utama sistem pertahanan yang dimiliki Indonesia, baik yang dimiliki masing-masing insitusi angkatan perang maupun kemampuan dari alat pertahanan tersebut yang belum bisa menjangkau seluruh keamanan wilayah Indonesia. Dalam upaya pencegahan ancaman yang terjadi di Indonesia, posisi militer sangat penting untuk dirumuskan dalam sistem pertahanan Negara, karena militer merupakan institusi legal dalam Negara yang memiliki kekuatan nyata. Militer Indonesia merupakan suatu institusi yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk menggunakan kekuatan, biasanya termasuk menggunakan senjata dalam mempertahankan stabilitas keamanan dalam negerinya. Peter Paret mengatakan "kekuatan militer merupakan ekspresi implementatif dari total kekuatan Negara yang diwujudkan dalam berbagai bentuk gelar kekuatan bersenjata. Berdasarkan gagasan ini, pengembangan kekuatan militer suatu Negara harus melambangkan total kekuatan nasional yang dimiliki oleh Negara tersebut".

Kegagalan suatu Negara untuk membangun kekuatan militer yang tangguh dapat dipandang sebagai

bentuk kelemahan pemerintah nasional dalam mengalokasikan kekuatan nasional ke bidang pertahanan Negara. Hal yang memprihatinkan lagi adalah kondisi materil dan Alutsista TNI sudah sangat tua, banyak yang sudah expired, seperti rudal rapier sebagian besar usianya antara 25-40 tahun, bahkan beberapa KRI berusia antara 41-64 tahun. Kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk terus dipelihara dan diperbaiki agar tetap digunakan, karena sudah tidak cukup memberikan dampak deterrent (penangkalan) baik terhadap ancaman yang timbul dari dalam maupun dari Negara luar. Dengan demikian secara kualitas maupun kuantitas Alutsista tersebut masih jauh di bawah standar atau belum sesuai dengan TOP (Tabel Organisasi dan Peralatan) dan DSPP (Daftar Susunan Personil dan Peralatan). Maka dari itu dengan adanya kendala militer Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan, Indonesia melakukan kerjasama militer dengan Rusia.

Kondisi militer Indonesia yang kurang baik saat ini dan ketergantungan Indonesia kepada Amerika Serikat yang sangat besar -terutama masalah sistem persenjataan dalam hal ini sangat diperlukan adanya suatu kerjasama Indonesia dengan Negara lain dalam bidang militer. Pada saat ini Rusia berusaha keras untuk meraih status sebagai Negara adidaya. Meskipun Rusia merupakan Negara yang sangat luas tetapi dengan teknologi pertahanan yang dimilikinya Rusia dapat menjaga teritorial wilayahnya dengan baik, namun statusnya masih jauh jika dibandingkan dengan status Uni Soviet dahulu. Rusia memiliki perindustrian yang cukup maju yang sebagai warisan dari masa pemerintahan Stalin. Industri yang dikenal antara lain industri perlengkapan dan peralatan militer, misalnya industri pesawat

tempur yang menghasilkan MiG dan Sukhoi serta helikopter, pesawat terbang, tank, rudal dan persenjataan ringan seperti senjata Kalashnikov.

Selain itu ada pula industri berat seperti industri baja, pertambangan mineral, batu bara dan minyak bumi. Rusia juga memiliki industri pertanian yang digalakkan Stalin dengan pertanian kolektifnya. Sekalipun merupakan Negara industri yang tergabung dalam G-8, Rusia masih berusaha mengatasi masalah ekonominya agar mampu menjadi Negara adikuasa kembali seperti ketika masa Uni Soviet. Rusia yang sudah sangat maju dalam bidang teknologi militernya dan pernah menjadi salah satu Negara adikuasa, menyebabkan Indonesia tertarik untuk melakukan kerjasama dengan Negara tersebut. Secara universal pertahanan negara merupakan elemen pokok dan merupakan salah satu unsur pilar utama dalam rangka tetap tegaknya suatu negara. Untuk menjamin kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dibutuhkan suatu sistem pertahanan negara yang tangguh. Mengingat keadaan NKRI maka tugas pertahanan sangat kompleks, sehingga dalam pelaksanaannya harus melibatkan seluruh sumber daya nasional.

Geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia, serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menyebabkan kondisi nasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan konteks strategis. Posisi seperti ini, berimplikasi pada terjalannya kepentingan negaranegara lain dengan kepentingan nasional Indonesia. Mencermati dinamika konteks strategis, baik global, regional maupun domestik, maka ancaman yang sangat mungkin dihadapi Indonesia ke depan, dapat

berbentuk ancaman keamanan tradisional dan ancaman keamanan nontradisional.

Ancaman keamanan tradisional berupa invansi atau agresi militer dari negara lain terhadap Indonesia diperkirakan kecil kemungkinannya. Peran PBB dan reaksi dunia internasional diyakini mampu mencegah, atau sekurangnya membatasi penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara untuk memaksakan kehendaknya terhadap negara lain. Ancaman Non Tradisional atau ancaman dari luar lebih besar kemungkinan bersumber dari kejahatan terorganisir lintas negara yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, dengan memanfaatkan kondisi dalam negeri yang tidak kondusif. Perkiraan ancaman dan gangguan yang dihadapi Indonesia ke depan, meliputi terorisme, gerakan separatisme, kejahatan lintas negara (penyelundupan, penangkapan ikan ilegal), pencemaran dan perusakan ekosistem, imigrasi gelap, pembajakan/perampokan, aksi radikalisme, konflik komunal, dan dampak bencana alam. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga dan melindungi kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara kesatuan Republic Indonesia, keselamatan dan kehormatan bangsa, serta ikut aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia. Berangkat dari amanat UUD 1945, maka kepentingan strategis pertahanan Indonesia harus dapat menjamin tercapainya kepentingan nasional. Berangkat dari esensi tersebut, maka kepentingan strategis yang bersifat tetap, kepentingan strategis yang bersifat mendesak, dan kerjasama internasional dibidang pertahanan. Pentingnya pertahanan Negara yang bersifat tetap adalah penyelenggaraan usaha pertahanan Negara untuk menjaga dan melindungi

kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia,serta keselamatan dan kehormatan bangsa dari setiap ancaman,baik yang berasal dari luar maupun yang timbul didalam negeri.

Meskipun perkiraan ancaman menunjukkan bahwa ancaman fisik dari luar yang mengarah pada ancaman kedaulatan kecil kemungkinannya, namun sebagai negara merdeka, berdaulat dan bermartabat, kepentingan strategis untuk mempertahankan diri harus selalu disiapkan dan dilaksanakan tanpa memandang ada atau tidaknya ancaman. Kepentingan strategis pertahanan yang bersifat mendesak pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kepentingan strategis pertahanan yang bersifat tetap.Isu keamanan aktual seperti diuraikan sebelumnya menunjukkan peningkatan yang cukup berarti terutama pada dekade terakhir. Oleh karena itu, maka kepentingan strategis yang bersifat mendesak diarahkan untuk mengatasi isu-isu keamanan aktual , agar keutuhan wilayah NKRI, keselamatan dan kehormatan bangsa dapat terjamin. Dengan demikian maka prioritas penyelenggaraan pertahanan negaradiarahkan untuk mengatasi isu-isu keamanan yang timbul di dalam negeri.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari keterkaitan dengan dunia luar. Oleh karena itu kebijakan pertahanan ke depan, juga diarahkan dalam kerangka menjalin hubungan dengan negara-negara lain, baik di kawasan regional maupun lingkup yang lebih luas. kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain, diletakkan diatas prinsip-prinsip kerjasama luar negeri pemerintah Indonesia, serta diarahkan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan sektor pertahanan negara, maupun untuk tujuan

menciptakan stabilitas keamanan kawasan regional dan dunia. Keterlibatan sektor pertahanan secara fisik tersebut dilaksanakan atas keputusan politik pemerintah.

Tinjauan Pustaka

Sesuai dengan judul skripsi ini penulis mencoba meninjau kembali teori-teori dengan diawali apa yang disebut dengan hubungan internasional. Pengertian dari hubungan internasional dinyatakan juga oleh Suwardi Wiraatmadja dalam bukunya Pengantar Hubungan Internasional adalah sebagai berikut : “Hubungan internasional lebih sesuai untuk mencakup segala macam hubungan antara bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan proses-proses yang menentukan cara hidup dan cara berfikir dari manusia”.

Dalam perkembangan studi hubungan internasional, dinamika internasional tidak statis akan tetapi selalu dinamis, termasuk dalam mempelajari inter relasi antar negara satu dengan lainnya. K.J.Holsti dalam buku Politik Internasional : Suatu Kerangka Analisis mendefinisikan: ”Segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara.Pengkajian disiplin ilmu hubungan internasional, termasuk didalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional dan meliputi segala segi hubungan di antara berbagai negara di dunia” Oleh Charles A Mc Cleland:

1. Suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek-aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan.
2. Sejarah baru dari politik internasional
3. Semua aspek internasional dari kehidupan social manusia dalam arti

semua tingkahlaku manusia yang terjadi/berasal dari suatu Negara yang dapat mempengaruhi tingkahlaku manusia dinegara lain.

4. Suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri

Sedangkan mengenai ruang lingkup hubungan internasional diutarakan Oleh Charles A Mc Cleland: "Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaankeadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Dalam interaksi antara dua pihak tadi, sumber daya aksiaksi adalah kedua pihak tersebut. Kapanpun, kita harus mengakui bahwa sumber-sumber daya yang mungkin ada hanya terdapat dalam pihak-pihak atau pelaku-pelaku yang bersangkutan. Akan tetapi, ada dua kompleksitas yang terlibat disini, yakni jika interaksi terjadi selama jangka waktu tertentu. Setiap pelaku mungkin dipengaruhi oleh interaksi yang idalami masa lalu, dan berdasarkan ini hal tersebut dapat dikatakan bahwa interaksi itu sendiri merupakan sumber daya perilaku. Kedua, berdasarkan pengalaman interaksi masa lalu, pelaku-pelaku dapat memperkirakan apa yang bakal terjadi dan masing-masing dapat bertindak sesuai dengan perkiraannya". Pada dasarnya, hubungan internasional lebih mengacu kepada seluruh bentuk interaksi antar masyarakat negara sebagai masyarakat internasional sebagai unit politik dalam sistem internasional".

Setelah berakhirnya perang dingin, kerjasama militer Indoensia-Rusia menemukan momentumnya ketika kunjungan Presiden Megawati Soekarnoputri ke Rusia pada tahun 2003. Kunjungan ini menghasilkan beberapa dasar kesepakatan kerjasama bilateral, termasuk kerjasama militer Indonesia-Rusia. Kerjasama militer ini kemudian diaplikasikan dalam dua

bentuk kerjasama, yaitu kerjasama pertahanan dan kerjasama teknik militer.

a. Kerjasama Pertahanan Indonesia-Rusia

Relasi Rusia-Indonesia meraih momentum baru setelah lama agak vakum. Arus balik memang sedang terjadi dalam hubungan kedua negara. Dalam kunjungannya ke Rusia pada 29 November hingga 1 Desember 2006, Presiden Yudhoyono menandatangani 12 kesepakatan kerjasama, termasuk rencana kerjasama bidang militer untuk periode 2006-2010. Menurut Suropto, alih teknologi dalam bidang militer sangat dibutuhkan agar Indonesia tidak terus bergantung pada negara luar yang system persenjataannya lebih maju. "Kerjasama dengan Rusia ini memang merupakan salah satu cara Indonesia untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap AS dalam bidang persenjataan yang sekarang ini sudah mencapai 65 persen, tetapi jangan sampai keluar dari ketergantungan yang satu masuk kepada ketergantungan yang lain," katanya. Suropto mengatakan jika Indonesia mengimpor senjata, maka akan menghadapi konsekuensi, yaitu sistem persenjataan yang berbeda dengan system dalam negeri.

"Misalnya, sistem radar yang diproduksi oleh Rusia belum tentu sama dengan sistem radar Indonesia, sehingga membutuhkan penyesuaian yang cukup lama dan para penggunanya akan mengalami kesulitan," ujarnya. Namun, jika Indonesia sudah dapat memproduksi sendiri peralatan tersebut, maka masalah perbedaan sistem persenjataan tersebut tidak akan terjadi, katanya. Sementara itu, Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakrie, mantan wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) mengatakan kerjasama militer dengan Rusia sangat diperlukan untuk membangun profesionalisme militer Indonesia yang sekarang ini kekurangan

perlengkapan militer. "Harus ada alih teknologi dalam rangka kemandirian militer Indonesia, selain itu fungsi praktisnya salah satunya adalah untuk menanggulangi masalah pencurian sumber daya alam kita di lautan. Selama ini banyak sekali alat control militer kita untuk mengawasi laut terluar kita sudah `collapse` dan kita membutuhkan regenerasi alat yang baru," ujarnya. Menurut Syahnakrie, Rusia sejak tahun 50an dan 60an merupakan mitra kerjasam militer Indonesia yang sungguh terpercaya dan dapat diandalkan.

"Banyak produksi alat militer Rusia seperti MI17 sudah diakui kualitasnya oleh dunia internasional, sehingga sangat signifikan Rusia dipilih sebagai mitra kerjasama militer Indonesia selain AS, India ataupun Cina," tambahnya. Pada hari pertama kunjungannya ke Rusia, Presiden Yudhoyono dijadwalkan mengunjungi St. Petersburg dan menuju Moskow pada hari kedua guna membicarakan hubungan bilateral. Pada kesempatan sebelumnya Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail M Bely mengatakan bahwa dalam pertemuan dua kepala negara juga akan dibicarakan mengenai rencana Indonesia mengajukan pinjaman negara senilai 1 miliar dolar AS.

Kedua negara kini menjajaki kerja sama lebih erat dan luas setelah mencapai kesepakatan kerja sama dalam bidang pertahanan. Selama lawatan singkat 20 jam di Jakarta, Presiden Putin menandatangani pemberian kredit lunak senilai 1 miliar dollar AS, yang akan digunakan Indonesia membeli persenjataan Rusia, termasuk enam pesawat tempur Sukhoi-30. Presiden Putin juga menandatangani nota kesepahaman untuk sejumlah kerja sama dalam bidang ekonomi, energi, transportasi, dan peluncuran satelit. Prospek hubungan Rusia-RI diyakini

sangat positif, tidak hanya didukung oleh keinginan kerja sama saling menguntungkan saat ini, tetapi juga oleh pengaruh hubungan persahabatan pada masa lalu.

b. Kerjasama Teknik Militer Indonesia-Rusia

Selain kerjasama dalam bidang pertahanan, Indonesia dan Rusia juga melakukan kerjasama dalam bidang Teknik Militer. Hal ini diperkuat oleh seluruh anggota Fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang akhirnya menyetujui penyampaian RUU di bidang Pertahanan dari pemerintah Tentang Pengesahan dan persetujuan antara Pemerintah RI dengan Federasi Rusia mengenai kerjasama bidang Teknik Militer. Persetujuan ini dibacakan oleh Wakil DPR RI, Pramono Anum selaku perwakilan pimpinan DPR didalam forum Sidang Rapat Paripurna DPR RI yang baru memasuki masa Sidang I di Gedung DPR RI, Jakarta. Pada kesempatan Sidang Rapat Paripurna tersebut, Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Mahfud Sidiq menyampaikan tiga hal yang terkait dengan pembahasan RUU tersebut. Pertama, bahwa pada dasarnya Komisi I DPR memahami langkah-langkah yang dilakukan pemerintah terkait kerjasama teknik militer dengan pemerintah Federasi Rusia. Hal ini dikhususkan dalam rangka memenuhi kebutuhan alat system utama persenjataan (Alutsista) bagi TNI. Kedua, Komisi I DPR RI menilai kerjasama ini merupakan kerjasama tingkat teknik militer dan dengan demikian kerjasama ini dapat dilanjutkan oleh pemerintah melalui Ratifikasi dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Ketiga mengatakan Komisi I DPR RI memandang perlu untuk dibentuk panitia kerja bersama pemerintah untuk mengkaji dan merumuskan klasifikasi kerjasama bilateral di bidang pertahanan.

Sementara itu Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro dalam Rapat Paripurna saat menyampaikan pendapat akhir Presiden RI, mengatakan perlu dilanjutkan ratifikasi atas persetujuan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia terkait kerjasama teknik militer tersebut dalam bentuk Perpres. Diungkapkan juga oleh Menhan, persetujuan kerjasama teknik militer dengan pemerintah Federasi Rusia ini merupakan pencapaian penting dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama interdependensi antar Negara khususnya kerjasama teknik militer.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif dan Ex Post Facto. Yang dimaksud dengan metode penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi yang kemudian meruntut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Penelitian Deskriptif bertujuan untuk melacak kembali, jika dimungkinkan, apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya sesuatu dalam metode deskriptif dipelajari masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari satu fenomena. Dengan metode ini dapat diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu factor dengan faktor lain.

Hasil Penelitian

Kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dan pemerintah Rusia dalam pengadaan peralatan militer diharapkan menjadi model kerjasama militer selanjutnya bagi kedua negara. Pengadaan alutsista di

Indonesia akan dilakukan secara berjenjang. Pengamatan dilakukan angkatan, pengajuan dilakukan Mabes TNI, dan keputusan diambil Dephan. Rusia dan Indonesia saling membutuhkan satu sama lain. Dengan tujuan yang sama, perdamaian dunia, keamanan dan kemakmuran. Rusia mewarisi potensi teknologi militer yang luar biasa dan merupakan satu-satunya negara di dunia, selain AS, yang memiliki kemampuan dalam membangun dan memproduksi seluruh elemen penting dari persenjataan modern. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia tidak memiliki cukup uang untuk mendanai sepenuhnya potensi industri pertahanan Rusia. Dengan demikian, atas dasar usaha mempertahankan tujuan utamanya, industri pertahanan Rusia tertarik untuk mengekspor produknya. Sebagai contoh, penjualan ekspor tahun 2005 terdiri atas 60% dari total produksi Almaz-Antey, perusahaan yang saat ini menduduki posisi 30 dalam peringkat US Defense News yang memasukkan 100 perusahaan pertahanan top dunia. Rusia menawarkan persenjataan mereka pada harga yang rendah tanpa persyaratan politik apa pun. Mereka juga siap mengikuti mekanisme barter, pertukaran komoditas dan dapat menawarkan program kredit sebagaimana yang telah diterapkan dalam perjanjian penjualan MiG dan Sukhoi kepada Indonesia dan Malaysia.

Sebagai sebuah kekuatan benua, Rusia memiliki kondisi alam yang andal dan memungkinkan bagi produksi peralatan tempur murah dengan tingkat efektivitas tempur yang tinggi. Pada waktu yang bersamaan Rusia juga telah menciptakan senjata anti tank modern jarak jauh yang mematikan. Peralatan tempur yang akan dibeli oleh Indonesia dari Rusia memiliki sejumlah keunggulan termasuk daya tangkal dan kemampuan teknologinya yang sesuai

dengan kebutuhan. Secara politik, ini akan memberikan ruang gerak bagi Indonesia agar tidak bergantung pada Amerika Serikat jika suatu waktu nanti negara Amerika Serikat menjatuhkan embargo kembali. Kerja sama pertahanan dengan Rusia akan membuka jalan bagi Indonesia atas akuisisi teknologi militer modern, bahkan hingga kepada produksi bersama atas senjata-senjata baru, seperti India dan Cina, dan tidak akan ada biaya-biaya politik atas kerja sama tersebut.

Kerjasama dengan Rusia, bukan hanya memanfaatkan uang, teknologi pesawat, tetapi memindahkan kekuatan teknologi udara Rusia ke Indonesia adalah cita-cita agar Indonesia tidak hanya menjadi pemilik teknologi, tetapi juga menguasai, sehingga Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan di Asia Tenggara, sekaligus mengembalikan kejayaan pertahanan tahun 1960-an yang pernah diukir oleh Indonesia. Syarat yang harus dipenuhi adalah kerjasama ini dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi, transfer teknologi dan berbagi teknologi.

Secara umum, perbandingan keuntungan kerjasama Indonesia-Rusia dan Indonesia-Amerika Serikat, adalah:

1. Rusia anti embargo, sedangkan Amerika rawan embargo.
2. Rusia dalam pembelian peralatan pertahanan militernya bisa dinego, misalnya sukhoi bisa dinego dengan imbal beli sembako; sedangkan Amerika sulit melakukan negosiasi atas penjualan semua peralatan pertahanan militernya.
3. Rusia tidak mempunyai banyak persyaratan jual beli dibandingkan Amerika, Rusia menyerahkan hak pakai sepenuhnya pada Indonesia atas semua peralatan militer yang dibeli, tidak seperti Amerika yang penggunaan peralatan militer harus

sesuai syarat dari negaranya, terkait masalah HAM, misalnya

4. Produk peralatan militer yang dijual Rusia, mempunyai kualitas dan fungsi yang sama dengan Rusia sendiri gunakan; tidak seperti Amerika yang mengurangi beberapa fungsi dari peralatan tempur yang dibeli karena takut kalah saing.
5. Rusia tidak keberatan soal transfer teknologi, hal ini sudah berhasil di Negara India dan Cina. Serta Rusia juga tidak keberatan akan modifikasi peralatan tempur yang dibeli, seperti pada saat pembelian Sukhoi oleh Indonesia, pihak Rusia lupa menyertakan adaptor pengisian BBM pesawat, akhirnya teknisi Indonesia melakukan sedikit modifikasi pada adaptor pengisian BBM milik A-4 Skyhawk, dan Sukhoi akhirnya bisa terbang perdana dari pangkalan TNI AU. Pihak Rusia sama sekali tidak keberatan dengan hal ini.

Kesimpulan

- I. Dari kerjasama teknik-militer ini disepakati Indonesia membeli 5 unit pesawat Sukhoi Su-27 SK dan 5 unit Su-30 MK buatan Rusia untuk melengkapi beberapa pesawat tempur yang sudah dimiliki oleh Indonesia. beberapa pelatihan juga diberikan oleh Rusia untuk personil TNI AU untuk menambah kesiapan para personil TNI AU tersebut dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Transfer of technology juga merupakan keuntungan tersendiri bagi Indonesia yang termasuk dalam perencanaan kerjasama yang akan dilakukan dimasa mendatang.
- II. Kerjasama teknik-militer dengan Rusia ini berpengaruh dalam peningkatan kesiapan personil dan alutsista yang dimiliki oleh TNI AU, karena dapat melengkapi pesawat tempur yang sudah dimiliki TNI AU

yang rata-rata sudah berumur tua. Beberapa personil TNI AU juga mendapat pelatihan yang dapat menambah Kesiapan dan pengetahuan personil.

III. Berjalannya hubungan kerjasama militer Indonesia-Rusia menunjukkan bahwa terjalannya hubungan yang baik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Rusia dalam menjalin komunikasi. Adanya pembelian persenjataan, pembelian dalam pembahasan maintenance ,repair dan overhaul dan latihan gabungan yang dilakukan kedua Negara pada periode 2010-2015.

IV. Indonesia memiliki motif dalam menjalin kerjasama antara Indonesia-Rusia yaitu untuk mencapai Kepentingan Pertahanan. Hal tersebut terbukti dari buku putih, doktrin pertahanan dan strategi pertahanan Indonesia yang menunjukkan bahwa adanya ancaman baik eksternal maupun internal yang dapat membahayakan kedaulatan Indonesia. Ancaman tersebut mendorong Indonesia untuk memperkuat unsur-unsur pertahanan militer. Dalam memaksimalkan strategi dan doktrin Indonesia hal tersebut perlu didorong dengan kekuatan militer yang superior dan modern. Oleh karena itu tentu Indonesia menjalin kerjasama militer dengan Rusia untuk memperkuat kekuatan militer Indonesia untuk mencapai kepentingan pertahanan.

Memang jika dilihat dari keseluruhan unsur kekuatan yang dimiliki oleh TNI AU, penambahan alutsista ini serta pelatihan yang diberikan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penambahan keseluruhan kekuatan TNI AU. Namun, kerjasama teknik-militer dengan Rusia ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif bagi peningkatan kesiapan personil dan

penambahan alutsista guna mencapai kekuatan pokok minimum TNI AU dimasa yang datang.

Saran

- a. Pemerintah diharapkan fokus dalam persoalan pertahanan karena sifatnya yang vital dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara dari resiko ancaman yang bisa datang dari dalam dan luar, dengan menaikan anggaran pemerintah juga telah berupaya dalam menaikan kesiapan alutsista dan personil TNI Angkatan Udara dalam menjaga kedaulatan tanah air.
- b. Kerjasama ini merupakan solusi bagi permasalahan alutsista yang dimiliki oleh Indonesia, oleh karena itu kerjasama ini perlu ditingkatkan dikemudian hari. Fokus untuk pembelian pesawat Sukhoi ini harus dapat ditingkatkan sehingga TNI Angkatan Udara kita dapat mencapai kekuatan pokok minimum untuk meningkatkan kesiapan personil dan alutsistanya. Dan bila hal ini sudah tercapai, fokus selanjutnya adalah bagaimana realisasi dalam transfer teknologi. Pemerintah harus berupaya maksimal untuk memanfaatkan kemudahan dan keuntungan dari kerjasama dengan Rusia ini untuk meningkatkan industri pertahanan dalam negeri yang dapat menguntungkan kedua belah pihak dan tentunya Indonesia karena tidak harus bergantung lagi dalam pengadaan alutsista dari pihak asing.
- c. Peningkatan anggaran pertahanan Negara Indonesia yang didorong dengan program Minimum Essential Force harus diimbangi dengan kemajuan industry pertahanan dalam negeri Indonesia dan Transfer of Teknologi yang diakukan ketika melakukan kerjasama militer. Hal trsebut guna mencegah yang tidak diinginkan seperti embargo alutsista

yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya yang membuat alutsista Indonesia mengalami stagnan.

DAFTAR PUSTAKA

- Winaatmadja Suwardhi. 1981, Pengantar Hubungan Internasional, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas), Hal. 1
- K.J. Holsti, Politik Internasional Suatu Kerangka Analisa, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hal. 26-27.
- Broek, Martin., Indonesia : Arms trade to a military regime (Penjualan senjata kepada rezim militer Indonesia). Pusat informasi dan jaringan aksi reformasi, Jakarta, November 1997). Buku Putih Pertahanan Indonesia, Tahun 2008
- Ambarwati. (2012). Hukum Humaniter Internasional: Dalam Studi Hubungan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers.
- Archellie, R. De. (2012). Pelibatan Rusia Dalam Kerangka Kerjasama Keamanan di Kawasan Asia Timur. (Tesis). Program Magister Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bakrie, C. R. (2007). Negara dan Postur TNI Ideal. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Goldstein, S. M. et al. (2013). "Teori Deterensi". Dalam Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad ke-21 Jilid 1. Jakarta: Kencana.
- Lott, A. D. (2013). "Sejarah Hubungan Internasional", dalam Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad ke-21 jilid 1. Jakarta: Kencana.
- Saputra, A. R. (2014). Dari Uni Soviet Hingga Rusia: Sejarah Panjang, Para Aktor Revolusi, Serta Perang Dingin Rusia Sampai Sekarang. Jogjakarta: Palapa.
- Sarangih, S. (2008). Bangkitnya Rusia: Peran Putin dan Eks KGB. Jakarta: Kompas.
- Sohelhi, M. (2011). Diplomasi: Praktik Komunikasi Internasional. Bandung: Simbiosis Rektama Media.
- Agussalim, D. (1999). Perimbangan Kekuatan Militer di Asia Pasifik Pasca Perang Dingin. Jurnal Sosial Politik, 3 (1), hlm.16-39.
- Anwar, S. (2012). Meningkatkan Kapasitas Dan Peran Diplomat Pertahanan Untuk Membangun Pertahanan yang Tangguh. Jurnal Pertahanan, 2 (2), hlm.107-125.
- Archellie, R. De. (2008). Pragmatisme Politik Luar Negeri Vladimir Putin. Glasnost, 4 (2), hlm.48-62.
- Bely, M. (2005). Rusia Dalam Wilayah Asia Pasifik: Progres dan Perspektifnya, sebuah presentasi yang disajikan oleh Y.M. Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia Y.M. Mikhail
- Bely pada Konferensi Pers. Jakarta: Kedubes Federasi Rusia Untuk Republik Indonesia.
- Botodiningrat, S. (2012). Perjalanan Politik Luar Negeri Republik Indonesia di Kancah Global: Sebuah Refleksi. Jurnal Diplomasi, 4 (1), hlm.1-19.
- Wulansari, I. (2012). Pola Pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan di Westphala. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 8 (2). hlm. 53-61
- Baylis, J. & Smith, S. 2001. The Globalization of World Politics: An Introduction to international 3rd ed. Great Britain; Oxford University Press.
- Sumber-Sumber lain :
Antara. (2008). RI-Rusia Jajaki Kerjasama Teknologi Pertahanan. [Online]. Tersediadi: www.antara.co.id/RI-Rusia/Jajaki/Kerjasama/Teknologi/Pertahanan.html. Diakses 2 Mei

2014. Deputy of Commonwealth of Independent States. (CIS). (2007). _____ . [Online]. Tersedia di: <http://cns.miis.edu/inventory/pdfs/cis.pdf>. Diakses 17 Maret 2014.
- Kedubes Federasi Rusia Untuk Republik Indonesia. (2008). Lima Prinsip Kebijakan Luar Negeri. [Online]. Tersedia di: <http://indonesia.mid.ru/web/indonesiaind/arsip-berita-2008-/-/assetpublis-her/CRrcHB6Up3>. Diakses 2 Agustus 2015
- Kedubes Federasi Rusia Untuk Republik Indonesia. (2012). Tentang Kunjungan Kerja Kapal-Kapal Armada Pasifik Rusia ke Indonesia. [Online]. Tersedia di: <http://indonesia.mid.ru/web/indonesiaind/arsip-berita-2013-/-/assetpublis-her/CRrcHB6Up3>. Diakses 2 Juli 2014.
- Kedubes Federasi Rusia Untuk Republik Indonesia. (2012). Siaran Pers Tentang Kecelakaan Pesawat Terbang "Sukhoi Superjet 100" di Indonesia. [Online] Kementerian Pertahanan. (2012). Berita Negara Republik Indonesia: Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama. [Online]. Tersedia di: <http://itjen.kemhan.go.id/system/files/peraturan/19-2012gab.pdf>. Diakses 1 April 2015.
- Kipp, W. Dr. Jacob. (2001). Russia's Nonstrategic Nuclear Weapons. [Online]. Tersedia di: http://fms.leavenworth.army.mil/documents/russias_nukes/russias_nukes.htm. Diakses 1 April 2014.
- Kompas. (2009). Rusia Ubah Doktrin Perang Nuklir. [Online]. Tersedia di: <http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/09/03351982/rusia.ubahdoktrinperangnuklir>. Diakses 1 April 2014.